

## REFORMASI POLRI PROSESNYA HARUS DILAKSANAKAN SECARA GRADUAL, SISTEMATIS NAMUN KONSISTEN



Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menunjukan Kartu Inafis dalam acara launching Quick Win Mabes Polri

**R**eformasi me-  
ngamanatkan  
perubahan  
dalam kehidupan bermasya-  
rakat, berbangsa dan ber-  
negara, yaitu kehidupan yang  
didasarkan kepada penyeleng-  
garaan Negara dan pemerin-  
tahan yang demokratis, di dalam  
rangka meningkatkan kesejah-  
teraan, menciptakan keadilan  
dan kepastian hukum bagi se-  
luruh warga Negara, sebagai-  
mana diamanatkan dalam  
konstitusi UUD 1945, demikian  
bagian dari sambutan Kapolri  
Jenderal Polisi Bambang  
Hendarso Danuri pada acara  
*launching* tentang Reformasi  
Birokrasi Polri yang dihadiri  
Presiden RI Bapak Susilo  
Bambang Yudhoyono, Wakil  
Presiden RI Bapak Yusuf Kalla,  
Ketua DPR RI, Para Menteri  
Kabinet Indonesia Bersatu,  
Duta Besar Negara Sahabat,  
Jaksa Agung, Panglima TNI,

Gubernur DKI Jakarta, Jabar,  
Banten, para pimpinan lembaga  
pemerintah non Departemen dan  
para pejabat Utama Mabes Polri  
bertempat di Gedung Rupattama  
Mabes Polri Jakarta

Lebih jauh Kapolri me-  
ngatakan program reformasi biro-  
krasi yang dilakukan pada jajaran  
Kepolisian Negara Republik Indo-  
nesia secara yuridis dilandasi  
sebagaimana telah diatur dalam  
UU No. 17 Tahun 2007 tentang  
Rencana Pembangunan Nasio-  
nal Jangka Panjang 2005-2025,  
khususnya pada Bab IV butir 1.2  
huruf E, yang menyatakan  
bahwa: "*Pembangunan Aparatur  
Negara dilakukan melalui refor-  
masi Birokrasi untuk meningkat-  
kan profesionalisme Aparatur  
Negara dan tata Pemerintahan  
yang baik, di pusat maupun di  
daerah, agar mampu mendukung  
keberhasilan pembangunan di  
bidang-bidang lainnya*".

Sejalan dengan hal ter-  
sebut, sesuai panduan yang diarah-  
kan dalam Peraturan Meneg PAN,  
Nomor : Per / 15 / M. PAN / 2008  
tentang *Pedoman Umum Reformasi  
Birokrasi Polri, yang susunan ke-  
anggotaannya terdiri dari Kelompok  
Team Pengarah (Steering  
Committee) dan 5 Kelompok Tim  
Teknis*. Kelima tim teknis tersebut,  
antara lain terdiri dari tim satu,  
menangani *bidang budaya dan  
manajemen perubahan*, tim dua  
*bidang organisasi dan tata laksana*,  
tim tiga *bidang quick wins*, tim empat  
*bidang MSDM dan remunerasi*, dan  
tim lima menangani *bidang evaluasi  
kinerja dan profil Polri 2025*. Kelima  
bidang ini dibentuk dan diawaki oleh  
Pati dan Pamen generai penerus  
Polri Lulusan Lemhanas dan Ses-  
pati Polri dan dapat menyelesaikan  
program secara simultan dalam  
waktu kurang lebih empat bulan,  
dibantu dan diarahkan oleh Kon-  
sultan Menpan, Bapak Prof. Ahmad  
Ruki dan tim.

Sesungguhnya sejak awal reformasi tahun 1998 yang lalu, Polri sudah sangat *concern* dan berkomitmen untuk melakukan perubahan dan pembaharuan, dan itu dibuktikan dengan respon Polri yang sangat cepat, dimana berselang satu tahun sejak bergulirnya reformasi (tanggal 1 Juli 1999), Polri sudah merancang dan mensosialisasikan konsep reformasi Polri keseluruhan jajarannya yang meliputi tiga dimensi penting yaitu reformasi dibidang struktural, instrumental dan kultural yang kesemuanya itu tertuang dalam buku biru dengan judul “Reformasi menuju Polri yang professional”

**Dengan pagelaran quick wins Polri memilih prioritas pada 4 program unggulan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat,**

Selanjutnya program yang disampaikan pada saat *fit* dan *proper test* di depan Komisi III DPR RI tentang Program akselerasi transformasi kultural, maka pada tanggal 27 Oktober 2008, dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/X/2008 tentang Program Kerja Aksele-rasi Tranformasi Polri menuju Polri yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat, dengan maksud untuk memberikan penguatan dan mengendalikan arah reformasi, agar *out come* yang dihasilkan nanti, sesuai dengan tuntutan keadaan dan tantangan tugas yang dihadapi Polri.



Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Kapolri dalam acara Launching Quick Wins

Terkait hal tersebut, Polri men-canangkan program *Quick Wins* yang merupakan rangkaian yang terujung dari reformasi birokrasi Polri. Rangkaian reformasi Polri mencakup evaluasi kinerja Polri, perubahan struktur organisasi dan penataan system remunerasi serta perubahan budaya kinerja yang dikembangkan terus menerus menuju profil Polri 2025 sebagai subsistem dari *good governance* yang dibangun dalam rangka pembangunan jangka panjang Nasional 2005 2005.

Dengan pagelaran *quick wins* Polri memilih prioritas pada 4 program unggulan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat, antara lain : *quick response* dibidang laporan dan pelayanan masyarakat, *transparansi* pelayanan SIM, STNK dan BPKB, *pengelolaan rekrutmen anggota Polri* dibidang MSDM dan *tranparansi penyidikan* dengan layanan SP2HP di bidang Reserse. Polri menyadari bahwa untuk melaksanakan seluruh program reformasi tersebut tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi tentu

memerlukan waktu yang cukup lama dan prosesnya yang harus dilaksanakan secara gradual, sistematis namun konsisten.

Untuk itu Polri mengundang Preiden RI dan Wakil Presiden RI dan para undangan untuk menyaksikan *launching program reformasi birokrasi Polri*. Selain itu launching juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan baik ke dalam maupun ke seluruh lapisan masyarakat bahwa Polri berkomitmen dan siap untuk melaksanakan seluruh program reformasi, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sebelum menutup sambutannya Kapolri sangat berterima kasih kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta para tamu dan undangan lainnya dalam menyaksikan *lauching* tersebut, dengan demikian diharapkan akan dapat menjadi pendorong semangat, sekaligus menjadi tantangan bagi Polri untuk melaksanakan seluruh program reformasi birokrasi Polri dengan sebaik-baiknya. *(nats)\*\*\*\**

*Disarikan dari sambutan Kapolri pada acara Launching tentang reformasi birokrasi Polri bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri Jakarta.*